

BAB I

PENDAHULUAN

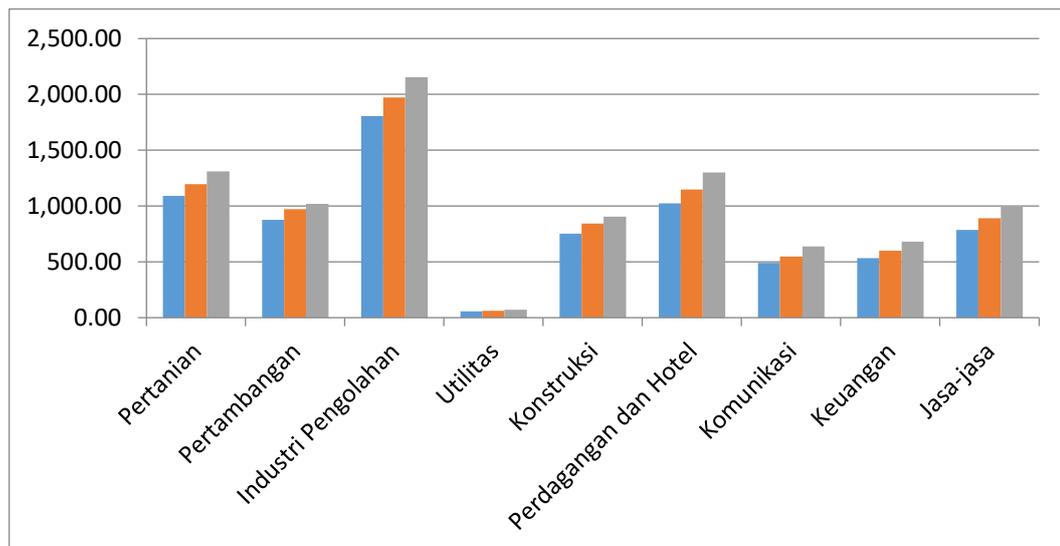
1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Industri manufaktur di Indonesia memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat dari kontribusi industri manufaktur terhadap besarnya Produk Domestik Bruto (PDB). Industri manufaktur berperan dalam penciptaan nilai tambah, penerapan tenaga kerja produktif dan pendorong pertumbuhan ekonomi. Peranan sektor industri di Indonesia memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, peningkatan produksinya tinggi hingga memikat investor dan kemampuan menciptakan nilai tambah dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. (Sumber: Kemenperin)

Sektor manufaktur sebagai salah satu dari sembilan sektor PDB yang mendorong pertumbuhan PDB Indonesia. Berikut tabel nilai PDB menurut lapangan usaha dan laju pertumbuhan PDB di Indonesia per sektor pada tahun 2011-2013.

Gambar 1.1

**Nilai PDB Menurut Lapangan Usaha dan
Laju Pertumbuhan PDB di Indonesia Tahun 2011-2013**



Sumber : Badan Pusat Statistik

Dapat dilihat bahwa perusahaan industri pengolahan (manufaktur), pertanian dan perdagangan, hotel dan restoran adalah tiga sektor yang paling mendominasi atas dasar harga berlaku dan harga konstan dari tahun 2011 hingga 2013. Dimana terdapat harga berlaku dari tiap sektor pada tahun 2013, industri pengolahan (manufaktur) mencapai 2.152,6 triliun rupiah, diikuti oleh sektor pertanian 1.311 triliun rupiah dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1.301,5 triliun rupiah. Sedangkan pada harga konstan yang terjadi pada 2013, industri pengolahan (manufaktur) mencapai 707,5 triliun rupiah, diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran 501,2 triliun rupiah dan sektor pertanian sebesar 339,9 triliun rupiah. Dapat di simpulkan pada sektor industri pengolahan tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 mencapai kenaikan sebesar 91% dan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 mencapai kenaikan sebesar 92%. Industri pengolahan yang paling mendominasi nilai PDB lapangan usaha dari ketiga sektor.

Industri otomotif di Indonesia telah menjadi penopang dari sektor manufaktur karena banyaknya produsen mobil yang tertarik menanam modalnya di Indonesia dengan membuka pabrik produksi mobil. Saat ini Indonesia sedang mengalami masa peralihan dari tempat produksi untuk ekspor menjadi pasar penjualan karena meningkatnya PDB (produk domestik bruto) per kapita. Kapasitas total produksi mobil yang dirakit di Indonesia kurang lebih dua juta unit per tahun. Disamping itu, kelengkapan informasi yang diungkap dalam laporan keuangan masih kurang dan masih terdapat item-item yang disajikan belum sesuai dengan keputusan BAPEPAM (Supriadi, 2010).

Tabel 1.1

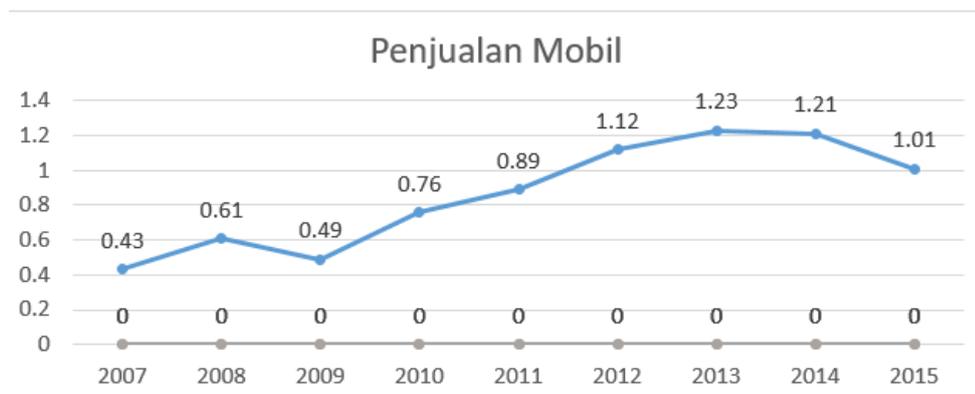
Statistik Pertumbuhan Ekonomi & Penjualan Mobil di Indonesia:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PDB² (annual % change)	6.3	6.0	4.6	6.2	6.2	6.0	5.6	5.0	4.8 ¹
PDB per Kapita² (in USD)	1,861	2,168	2,263	3,125	3,648	3,701	3,624	3,492	
Penjualan Mobil (dalam juta unit)	0.43	0.61	0.49	0.76	0.89	1.12	1.23	1.21	1.01

Sumber: Bank Dunia & Gaikindo

Hubungan antara penjualan mobil dengan pertumbuhan ekonomi terjadi ketika pertumbuhan PDB per kapita yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, perekonomian di Indonesia mengalami pertumbuhan setidaknya 6% pertahun dan penjualan mengalami kenaikan yang pesat, namun pada tahun 2009 nilai PDB² mengalami penurunan akibat adanya krisis keuangan global dan mengakibatkan penurunan penjualan yang cukup tajam. Pertumbuhan ekonomi setelah periode orde baru mengalami kejayaanya pada tahun 2011 sebesar 6,2%, namun setelah tahun 2011 mengalami perlambatan perekonomian akibat adanya guncangan internasional yang terjadi karena perlambatan pertumbuhan global dan harga komoditi yang menurun drastis. Untungnya penjualan mobil tidak mengalami penurunan penjualan dan masih bisa mencapai penjualan tertinggi pada tahun 2013 sebesar 1,23 juta mobil. Dapat disimpulkan bahwa penjualan mobil terendah pada tahun 2007 sebesar 0,43 dan tertinggi pada tahun 2013 sebesar 1,23. Penjualan mobil dari tahun 2009 sampai tahun 2013 secara beruntun mengalami kenaikan.

Gambar 1.2
Penjualan Mobil



Sumber: Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO)

1.2 Latar Belakang

Perkembangan informasi berlangsung sangat cepat dalam era globalisasi, begitu juga kondisi lingkungan ekonomi yang berhubungan erat dengan unit usaha bisnis

yang terus mengalami perubahan membutuhkan informasi antara lain adalah informasi yang diperoleh dari laporan-laporan perusahaan sebagai unit bisnis.

Pasar modal adalah salah satu alternatif atau sarana dalam memobilisasi dana masyarakat serta sekaligus sebagai sarana investasi bagi pemilik modal. Melihat potensi pertumbuhan pasar modal di Indonesia, pemerintah menyadari pentingnya pasar modal terhadap pembangunan negara. Adapun langkah yang diupayakan Pasar Modal dalam pembangunan negara Republik Indonesia ini adalah dengan melakukan penawaran umum (go publik). Dan hal lain yang sangat penting adalah telah berlaku efektifnya Undang-Undang Pasar Modal yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1995.

Di dalam UU No. 8 Tahun 1995 secara tegas mewajibkan setiap perusahaan yang menawarkan efeknya melalui Pasar Modal, atau disebut emiten, untuk mengungkapkan seluruh informasi mengenai keadaan usahanya termasuk keadaan keuangan, aspek hukum, manajemen dan harta kekayaan perusahaan (*Full Disclosure*) kepada masyarakat. Karena pada prinsipnya membeli suatu barang janganlah seperti membeli kucing dalam karung, tetapi barang yang dibeli haruslah jelas wujudnya.

Namun demikian untuk yang namanya tindakan membeli efek maka sektor hukum mensyaratkan untuk keterbukaan (*Disclosure*) lebih dari yang berlaku untuk membeli barang biasa. Cukup banyak pemikiran telah dicurahkan dan cukup banyak aturan main yang telah digulirkan hanya untuk menjamin agar unsur transparansi tersebut benar-benar muncul kepermukaan. Begitu pentingnya eksistensi dan kedudukan unsur keterbukaan (*Disclosure*) dalam Pasar Modal, sehingga kalau belum bisa menjamin unsur keterbukaan ini maka hukum pasar modal tersebut dianggap masih belum apa-apa.

Kata *disclosure* memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan (Ghozali dan Chariri, 2007). Bila dikaitkan dengan pengungkapan informasi, *disclosure* mengandung pengertian bahwa pengungkapan informasi tersebut harus memberikan penjelasan yang cukup dan bisa mewakili keadaan yang sebenarnya dalam perusahaan. Dengan demikian, informasi harus lengkap, jelas, akurat, dan dapat dipercaya dengan mencitrakan kondisi yang sedang dialami perusahaan, baik

informasi keuangan maupun non-keuangan, sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan.

Darrough (1993) dalam Na'im dan Rakhman (2000), mengemukakan ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu:

1. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*), adalah pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).
2. Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), adalah pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh lembaga yang berwenang. Pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen dengan mempertimbangkan kebijakan tertentu untuk menyampaikan informasi yang relevan kepada pengguna laporan keuangan terkait dengan aktivitas-aktivitas perusahaan.

Hasil survey Pricewaterhouse and Coopers terhadap investor-investor internasional di Asia (FCGI 2004), menunjukkan bahwa Indonesia dinilai sebagai salah satu yang terendah dalam bidang standar pengungkapan dan transparansi, serta penerapan auditing. Posisi Indonesia dibandingkan dengan negara Asia lainnya dan Australia dalam hal praktek pengungkapan dalam laporan keuangan, Indonesia dikelompokkan pada kelompok paling buruk bersama dengan Thailand, China, dan India.

Berdasarkan data Bapepam-LK per tanggal 30 Desember 2010, badan ini telah memeriksa 129 kasus dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Itu berdasarkan kewenangan Bapepam-LK yang diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Kasus-kasus yang ditangani antara lain kasus yang terkait dengan keterbukaan emiten dan perusahaan publik, perdagangan efek, dan pengelolaan investasi. Kasus yang terkait dengan keterbukaan emiten dan perusahaan publik. Kasus itu antara lain dugaan pelanggaran atas ketentuan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, transaksi material, keterbukaan pemegang saham tertentu, informasi atau fakta material yang harus segera diumumkan kepada publik, penyajian laporan

keuangan, penggunaan dana hasil penawaran umum, dan lain-lain. (bisnis.tempo.co.id)

Berdasarkan kasus di atas dapat disimpulkan bahwa pengungkapan laporan keuangan secara sukarela yang dilakukan oleh perusahaan yang satu berbeda dengan perusahaan yang lainnya. Selain itu, pengungkapan sukarela membuat perusahaan bebas memilih jenis informasi yang akan diungkapkan sesuai dengan relevansi informasi yang dibutuhkan manajemen dalam pengambilan keputusan perusahaan. Akibatnya, manajemen bebas dalam melakukan praktik kecurangan dalam pengungkapan laporan keuangan demi kepentingan manajemen itu sendiri. Berikut tabel persentase pengungkapan sukarela industri otomotif.

Tabel 1.2
Pengungkapan Sukarela Industri Otomotif tahun 2010-2014

No.	Nama Perusahaan	Persentase
1	Astra International	29%
2	Astra Autoparts	27%
3	Indokordsa	24%
4	Goodyear Indonesia (\$)	25%
5	Gajah Tunggal	26%
6	Indomobil Sukses Indonesia	21%
7	Indospring	21%
8	Multi Prima Sejahtera	12%
9	Multistrada arah Sarana	21%
10	Nippres	16%
11	Selamat Sempurna	23%

Sumber: Data yang diolah Penulis

Pengungkapan sukarela memiliki lebih banyak informasi yang diungkapkan daripada pengungkapan wajib sehingga lebih rinci dan lengkap. Informasi tambahan dalam pengungkapan sukarela dapat membantu pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Informasi tersebut juga dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak manajemen dan pihak eksternal, dan hal tersebut tentunya berhubungan dengan rasio *Leverage*.

Menurut Martono dan Harjito (2008:295), rasio *Leverage* adalah mengacu pada penggunaan asset dan sumber dana oleh perusahaan dimana dalam penggunaan

asset atau dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap. Rasio *leverage* adalah kemampuan perusahaan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (hutang ekstrim) yaitu, perusahaan terjebak dalam tingkat hutang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Semakin besar utang perusahaan maka semakin besar pula ketergantungan perusahaan terhadap pinjaman dari kreditor.

Dengan tingkat *leverage* yang tinggi mengakibatkan perusahaan harus mengungkapkan informasi yang lebih banyak untuk menyakinkan investor bahwa perusahaan mampu untuk melunasi hutangnya tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus mengungkapkan laporan keuangan secara sukarela dimana laporan tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh para investor atau kreditor. Sehingga semakin tinggi rasio *leverage* maka semakin besar pengungkapan secara sukarela dilakukan oleh perusahaan. Namun, hal ini tidak sesuai dengan data yang ada di lapangan (Lampiran Tabel 1.2). Tabel tersebut menunjukkan bahwa beberapa perusahaan mengalami kenaikan rasio *leverage*, tetapi *voluntary disclosure* mengalami penurunan rasio, begitu juga sebaliknya. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang ada. Teori yang ada sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vera (2014) yang menyatakan bahwa rasio *leverage* berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure*.

Earning Per Share (EPS) merupakan alat analisis tingkat profitabilitas perusahaan yang menggunakan konsep laba konvensional. Menurut Syafri (2008) *Earning Per Share* ialah rasio yang menunjukkan seberapa besar kemampuan per lembar saham di dalam menghasilkan laba. EPS ini sangat berpengaruh pada harga pasar saham. Semakin tinggi EPS, maka semakin mahal harga suatu saham, dan sebaliknya. Oleh sebab itu pada umumnya manajemen perusahaan, pemegang saham biasa dan juga calon pemegang saham sangat tertarik akan *Earning Per Share* karena EPS merupakan suatu indikator keberhasilan suatu perusahaan. Sehingga, semakin besar EPS perusahaan maka semakin besar kemungkinan perusahaan harus mengungkapkan secara sukarela informasi yang berkaitan dengan

pengambilan keputusan investor dalam berinvestasi di perusahaan dimana salah satu informasi yang dapat digunakan oleh investor adalah pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abu Hamour *et al* (2014) yang menyatakan bahwa *Earning Per Share* (EPS) memiliki pengaruh positif terhadap luas pengungkapan secara sukarela.

Umur perusahaan adalah lamanya sebuah perusahaan berdiri, berkembang dan bertahan. Umur perusahaan dihitung sejak perusahaan tersebut berdiri berdasarkan akta pendirian sampai penelitian dilakukan. Semakin lama umur perusahaan, semakin banyak informasi yang telah diperoleh masyarakat tentang perusahaan tersebut menimbulkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk perusahaan tersebut. Menurut Yularto dan Chariri (2003) dalam Istanti (2009) umur perusahaan menunjukkan perusahaan tetap eksis, mampu bersaing dan memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian. Menurut Wallace *et all* dalam Istanti (2009) semakin panjang umur perusahaan akan memberikan pengungkapan informasi keuangan yang lebih luas dibanding perusahaan lain yang umurnya lebih pendek dengan alasan perusahaan tersebut memiliki pengalaman lebih dalam pengungkapan laporan tahunan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita dan Hery (2012) yang menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan informasi sukarela.

Menurut Syafri (2008), *Return On Equity* ialah perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas. Sedangkan menurut Sawir (2009) *Return On Equity* ialah rasio yang memperlihatkan sejauh manakah perusahaan tersebut mengelola modal sendiri (*net worth*) dengan secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri ataupun pemegang saham suatu perusahaan. ROE tersebut menunjukkan rentabilitas modal sendiri atau yang sering disebut dengan rentabilitas usaha. Semakin tinggi nilai rasio ini maka perusahaan tersebut semakin baik karena posisi perusahaan semakin kuat. Dengan tingkat return yang tinggi maka perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi secara rinci begitu pun sebaliknya saat tingkat return yang diperoleh rendah maka perusahaan cenderung akan menyembunyikan informasi perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita

dan Hery (2012) yang menyatakan bahwa ROE berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi sukarela.

Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Menurut Agnes Sawir dalam Amellia Atassya (2012:17) ukuran perusahaan adalah ukuran perusahaan yang dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. Sedangkan menurut Sigit dalam Hana Tiara (2012) ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva. Perusahaan besar umumnya lebih banyak mendapat sorotan publik. Hal ini dikarenakan, perusahaan besar memiliki kegiatan usaha yang lebih kompleks dan mungkin menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, perusahaan besar dituntut untuk mengungkapkan informasi lebih luas sebagai bentuk pertanggungjawabannya daripada perusahaan kecil. Semakin besar ukuran perusahaan, maka akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi lebih luas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pancawati (2008) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi sukarela.

Dengan demikian penulis tertarik untuk mencoba melakukan suatu penelitian mengenai *voluntary disclosure* dengan judul **“Pengaruh Leverage, EPS, Age, ROE, dan Size terhadap Voluntary disclosure (Studi pada Perusahaan Industri Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Pada praktiknya, terdapat dua macam pelaporan dalam perusahaan yaitu mandatori dan voluntary, dimana mandatori bersifat wajib dan voluntary bersifat sukarela. Tetapi masih banyak perusahaan yang kurang terbuka dalam pengungkapan *Voluntary disclosure*. Sedangkan para investor tidak hanya melihat dari kinerja perusahaan dari laporan keuangan. Investor juga melihat aspek-aspek dalam *Voluntary disclosure*. Misalnya tingkat *leverage* yang tinggi mengakibatkan perusahaan harus mengungkapkan informasi yang lebih banyak untuk

menyakinkan investor bahwa perusahaan mampu untuk melunasi hutangnya tersebut. Semakin besar EPS perusahaan maka semakin besar kemungkinan perusahaan harus mengungkapkan secara sukarela informasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investor dalam berinvestasi di perusahaan. Semakin panjang umur perusahaan akan memberikan pengungkapan informasi keuangan yang lebih luas dibanding perusahaan lain yang umurnya lebih pendek dengan alasan perusahaan tersebut memiliki pengalaman lebih dalam pengungkapan laporan tahunan. Semakin tinggi ROE maka perusahaan akan cenderung mengungkap informasi secara rinci. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengungkapan *Leverage*, *EPS*, *Age*, *ROE*, *Size*, dan *Voluntary Disclosure* dalam perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan *Leverage*, *EPS*, *Age*, *ROE*, *Size*, dan *Voluntary Disclosure* dalam perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial dari :
 - a. *Leverage* terhadap *Voluntary disclosure* pada industri otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2014?
 - b. *EPS* terhadap *Voluntary disclosure* pada industri otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2014?
 - c. *Age* terhadap *Voluntary disclosure* pada industri otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2014?
 - d. *ROE* terhadap *Voluntary disclosure* pada industri otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2014?
 - e. *Size* terhadap *Voluntary disclosure* pada industri otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2014?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengungkapan *Leverage*, *EPS*, *Age*, *ROE*, *Size*, dan *Voluntary Disclosure* pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2014.
2. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan *Leverage*, *EPS*, *Age*, *ROE*, *Size*, dan *Voluntary Disclosure* pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2014.
3. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial dari :
 - a) *Leverage* terhadap *Voluntary disclosure* pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2014.
 - b) *EPS* terhadap *Voluntary disclosure* pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2014.
 - c) *Age* terhadap *Voluntary disclosure* pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2014.
 - d) *ROE* terhadap *Voluntary disclosure* pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2014.
 - e) *Size* terhadap *Voluntary disclosure* pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2014.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak berkepentingan yang dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu:

1.6.1 Aspek Teoritis

1. Bagi penulis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam antara hubungan pengungkapan *Leverage*, *EPS*, *Age*, *ROE*, *Size*, dan *Voluntary Disclosure* dalam perusahaan otomotif pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan acuan pada penelitian selanjutnya, khususnya pada bidang kajian mengenai pengungkapan sukarela laporan keuangan perusahaan.

1.6.2 Aspek Praktis

1. Bagi Investor

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi pertimbangan dalam sebuah pengambilan keputusan untuk investasi dan memilih perusahaan yang dapat mengembalikan investasi dengan tingkat pengembalian yang diharapkan.

2. Bagi perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi memberikan manfaat bagi pihak perusahaan untuk lebih memahami hubungan pengungkapan *Leverage*, *EPS*, *Age*, *ROE*, *Size*, dan *Voluntary Disclosure* dalam perusahaan otomotif pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sehingga dapat lebih mengantisipasi ataupun memberikan penanganan yang tepat atas kondisi tersebut serta lebih bijak dalam mengambil keputusan nantinya.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan-batasan yang akan diteliti agar penelitian dapat lebih terarah dan sesuai tujuan penelitian. Berikut merupakan ruang lingkup penelitian ini:

1. Data penelitian ini merupakan data dari perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Variabel yang digunakan adalah *Leverage*, *EPS*, *Age*, *ROE*, *Size*, dan *Voluntary Disclosure*.
3. Objek penelitian adalah perusahaan yang tercatat selama 5 (lima) tahun berturut-turut dari tahun 2010-2014.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang menyangkut fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti disertai dengan argumentasi teoritis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini mengungkapkan dengan jelas, ringkas, dan padat mengenai landasan teori dari variabel penelitian yaitu penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam kaitannya dengan penilaian kinerja. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data, serta ruang lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab atau menjelaskan masalah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan pembahasan hasil dari analisis penelitian, pengujian yang dilakukan, dan analisis hipotesis. Sehingga akan jelas gambaran permasalahan yang terjadi dan hasil dari analisis pemecahan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu juga bab ini berisi keterbatasan dan masalah yang dihadapi selama proses penelitian, sehingga dapat berguna dan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.